



LAPORAN KEGIATAN

THE THIRD MEETING OF THE PREPARATORY COMMITTEE FOR THE IN-PERSON SEGMENT OF THE FIFTH WORLD CONFERENCE OF SPEAKERS OF PARLIAMENT

Jakarta - Indonesia
30 April 2021



BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN PELAKSANAAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

"The Third meeting of the Preparatory Committee for the in-person segment of the Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP)"

(VIRTUAL)

30 April 2021

I. PENDAHULUAN

World Conference of Speaker Parliament (WCSP) merupakan pertemuan penting yang dihadiri para Ketua Parlemen yang tergabung di dalam Inter-Parliamentary Union (IPU). Pertemuan ini menunjukkan bahwa parlemen bersungguh-sungguh dalam upayanya melakukan diplomasi parlemen sebagai penyeimbang diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pertemuan ini sedianya dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan Vienna, Austria sebagai lokasi penyelenggaraan pada tahun 2020. Pertemuan yang seharusnya berjalan secara fisik tersebut terpaksa dialihkan menjadi pertemuan virtual dan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2020.

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan langkah para Ketua Parlemen untuk mendorong diplomasi global menjadi lebih inklusif dan melibatkan parlemen sebagai perwakilan masyarakat. Oleh karena itu pertemuan secara fisik yang seharusnya diselenggarakan tahun lalu ditunda pelaksanaannya menjadi akhir tahun 2021. Salah

satu persiapan yang dilakukan dalam rangka WCSP adalah membentuk *Preparatory Committee* yang beranggotakan para Ketua Parlemen dan bertugas untuk menyusun Kerangka Acuan (ToR), Agenda, maupun tema yang dipilih. Dr. (H.C.) Puan Maharani terpilih sebagai salah satu anggota *Preparatory Committee* sebagai perwakilan Grup Asia-Pasifik di IPU pada Sidang *Governing Council* pada bulan November 2020. Pada pertemuan ketiga pada tanggal 30 April 2021, Ketua DPR RI sebagai anggota *Preparatory Committee (Prepcomm)*, didampingi oleh Dr. Sihar Sitorus, dengan Sekretariat IPU, Jenewa sebagai penyelenggara.

A. SUSUNAN DELEGASI

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Dr. (H.C.) Puan Maharani	F. PDIP/ A-188	Ketua DPR RI
2.	Dr. Sihar Sitorus	F. PDIP/ A-139	Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen

B. VISI DAN MISI DELEGASI

- Mendapatkan gambaran besar terkait pelaksanaan the Fifth World Conference of Speakers of Parliament yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 6-8 September 2021.
- Memberikan pandangan/ide Indonesia terkait substansi dan teknis acara tersebut.
- Bertukar pengalaman dengan Ketua Parlemen yang tergabung di dalam *Preparatory Committee*. Sebagai informasi, Indonesia sudah beberapa kali menjadi anggota komite ini, salah satunya oleh Bapak Agung Laksono, Ketua DPR RI, pada tahun 2015.

C. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Materi yang dijadikan referensi bagi Ketua DPR RI diolah oleh Tenaga Ahli dan Sekretariat KSI BKSAP berupa Pidato dan Saran Butir Wicara.

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA ACARA

1. *Preparatory Committee meeting of the 13th Summit of Women Speakers of Parliament (13SWSP)*

- Adopsi agenda
- Persiapan pertemuan tatap muka 13SWSP
- Pengarus-utamaan jender dalam program *the Fifth World Conference of Speakers of Parliament*
- Hal lainnya

2. *Preparatory Committee meeting of 5th World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP)*

- Adopsi agenda
- Adopsi laporan rapat kedua *Preparatory Committee*
- Proposal penyelenggaraan Debat Umum
- Proposal penyelenggaraan panel pada 5WCSP
- *Outcome Document*
- Hal lainnya

B. JALANNYA PERTEMUAN

1. *SUMMIT OF WOMEN SPEAKER*

Agenda 1. Adopsi Agenda

Rapat virtual dibuka oleh **Mr. Martin Chungong, Sekretaris-Jenderal Inter-Parliamentary Union (IPU)**, yang berdasarkan rapat sebelumnya berharap agar pertemuan para Ketua Parlemen pada bulan September 2021 berlangsung interaktif. Format yang ditawarkan adalah *Doha Debate* dengan harapan agar para Ketua Parlemen dapat lebih leluasa dalam bertukar pikiran dan menyampaikan ide-ide mereka terkait dengan isu yang diangkat pada sidang tahun ini.

Sekretaris-Jenderal IPU mengajukan dua yang akan diangkat pada *Summit of Women Speaker* pada tahun ini, yaitu terkait *Women in Pandemic Recovery* maupun *Women in post Pandemic Recovery*. Isu-isu terkait pandemi masih akan terus dibahas mengingat masih merebaknya penyebaran virus di seluruh dunia walaupun proses vaksinasi terus dilakukan.

Dr. (H.C.) Puan Maharani, Ketua DPR RI, menekankan agar persidangan yang diselenggarakan dapat mendorong sinergi dan kolaborasi di antara parlemen seluruh dunia. Pencapaian dan pengarusutamaan kesetaraan jender hanya dicapai jika melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari kedua jender, laki-laki maupun perempuan. Penguatan peran perempuan tidak hanya akan menguntungkan salah satu jender saja tetapi kita semua. Parlemen dapat memberikan sudut pandang yang berbeda yang dapat memperkuat maupun memperbaiki kebijakan terkait pengarusutamaan isu kesetaraan jender.

Ms. Claudia Roth, Deputi Ketua Parlemen Jerman mendukung pelaksanaan sidang virtual dengan format *Doha Debate* yang merupakan dukungan agar keputusan yang dihasilkan merupakan produk perdebatan yang demokratis. Ms. Roth juga mengusulkan tema agar mengangkat isu khusus terkait anak-anak perempuan yang masih bersekolah maupun kesejahteraan mereka.



Dr. (H.C.) Puan Maharani, Ketua DPR RI didampingi oleh Dr. Sihar Sitorus, Wakil Ketua BKSAP

Agenda 2. Persiapan pertemuan tatap muka persidangan 13SWSP

Ketua Rapat yang juga **Ketua Parlemen Norwegia, Ms. Tone Wilhelmsen Trøen** membuka rapat dan mengajukan tema persidangan terkait *Gender mainstreaming*. Topik mengenai ini penting karena perwakilan parlemen dalam Lembaga politik maupun pengambilan keputusan masih relatif rendah. Para Ketua Parlemen dan pengambil kebijakan perlu memikirkan bagaimana cara meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen sekaligus bagaimana meningkatkan ketertarikan mereka untuk terlibat dalam politik.

Di beberapa negara karir politik perempuan seringkali terhambat karena adanya *hate speech* maupun *harrashment* dari para kolega laki-laki maupun masyarakat. Hal inilah yang turut berperan dalam mengurangi keterlibatan perempuan dalam proses politik maupun pengambilan keputusan. Karena itulah, Ms. Troen berterima kasih kepada Sekretariat IPU yang telah menunjukkan komitmen dalam mendorong kesetaraan dan pengarus-utamaan jender dalam persidangan yang diselenggarakan.

Lebih lanjut Ms. Troen juga mendukung usulan Indonesia pada sidang sebelumnya untuk menghindari voting dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting agar keputusan yang dihasilkan melibatkan suara dan dukungan seluas mungkin yang tentu saja sulit jika menggunakan voting.

Dr. (H.C.) Puan Maharani, Ketua DPR RI, menyatakan bahwa telah ada berbagai forum yang membahas isu *gender equality*, karenanya:

- Berharap 5WCSP agar mendorong sinergi berbagai forum internasional untuk berkolaborasi memajukan isu *gender equality*.
- Berharap adanya nilai tambah berupa peran Parlemen, yang dapat memperkuat atau memperbaiki kebijakan *gender equality*.

Untuk metode kerja *Preparatory Committee* ini, menyarankan jika belum ada kesepakatan pada pertemuan malam ini, maka pimpinan rapat dapat merangkum dahulu berbagai masukan yang ada. Selanjutnya pimpinan rapat dapat menyampaikan usulan baru yang merupakan *middle ground* persiapan 13SWSP. Masing-masing perlu ada fleksibilitas untuk *take and give*, kecuali terdapat keberatan mendasar (*strong objection*). Sebaiknya keputusan diambil secara konsensus, agar ada *ownership* atas keputusan tersebut.

Sekretariat IPU dalam laporannya telah menyusun tema baru, yaitu “*Women at the centre: From confronting the pandemic to furthering progress in a gender responsive recovery.*” Ketua DPR mengusulkan perubahan untuk menunjukkan peran kepemimpinan Parlemen perempuan dan bersifat *forward looking*, seperti halnya pada tema 5WCSP 2020: “*Women’s Parliamentary Leadership: From confronting the pandemic to advancing progress in a gender responsive recovery.*”

Ketua DPR RI setuju akan usulan Sekretariat IPU terkait *opening session* dan 2 panel diskusi. Pada *opening session* dapat diundang tokoh perempuan internasional yang menginspirasi kepemimpinan perempuan secara global selama pandemi, seperti Kanselir Jerman, atau Perdana Menteri Selandia Baru.

Terkait topik panel diskusi, Ketua DPR RI setuju untuk diadakan 2 (dua) panel diskusi (yang diusulkan sekretariat IPU). Topik yang diangkat, sebaiknya juga bersifat *forward looking*, dan tidak saja mengidentifikasi capaian dan masalah selama ini. Untuk topiknya, beliau mengusulkan:

- Panel pertama terkait topik demokrasi dan partisipasi politik perempuan, terkait upaya peningkatan representasi perempuan pada pengambilan keputusan di masa paska pandemi.
- Panel kedua terkait topik ekonomi dan sosial, terkait peran perempuan untuk percepat pemulihan krisis ekonomi paska pandemi. Selain itu dapat dibahas isu sosial seperti upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan selama pandemi.



Dr. (H,C.) Puan Maharani memberikan intervensi

Terkait metode panel diskusi, Ketua DPR RI berpandangan panel diskusi yang dilakukan secara reguler sudah cukup efektif dan interaktif untuk memunculkan gagasan baru, ataupun untuk *sharing best practices*. Panel diskusi ini dapat dipandu

moderator profesional, dan para Ketua Parlemen perempuan dapat menjadi panelis, serta dilanjutkan diskusi dengan peserta lainnya.

Namun jika panel diskusi tetap akan dilakukan dengan metode *Doha Debate*, perlu dipertimbangkan agar tidak dilakukan *voting* diproses akhirnya. Karena sebetulnya kita tidak mencari posisi mana yang lebih unggul atau pandangan siapa yang kalah atau menang, melainkan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Ms. Stephanie D’Host, Presiden Senat Belgia menyatakan dukungannya terhadap tema yang akan diangkat dalam diskusi panel. Ms. D’Host juga menambahkan bahwa peran kedua jender penting dalam memajukan isu-isu jender, sehingga keterlibatan pada sidang ini seharusnya juga melibatkan para Ketua Parlemen laki-laki. Kesepakatan yang dicapai juga akan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas sehingga bentuk kebijakan nyata seperti “*affirmative action*” dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Ms. Host juga mengusulkan agar *Outcome Document* berbentuk *Chair Summary*.

Ms. Claudia Roth, Deputy Ketua Parlemen Jerman menyetujui usulan mengangkat isu kesetaraan jender dalam panel pertama, karena ini merupakan isu yang sangat penting. Ms. Roth juga mendukung usulan Indonesia terkait ***Global Compact*** karena akan memperluas cakupan isu yang dibahas pada persidangan mendatang. Lebih lanjut dia juga mengusulkan agar memasukkan ***Paris Agreement*** dan menekankan pada peran perempuan dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kedua jender juga harus duduk bersama dalam mendorong penguatan isu jender dan feminisme, seperti yang terlihat dalam sidang-sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), maupun kebijakan negara yang berorientasi jender.

Ms. Beatriz Argimón, President Parlemen Uruguay sepakat dengan usulan-usulan sebelumnya. Tema yang diambil harus berdasarkan konstruksi yang setara antara laki-laki dan perempuan terkait perannya dalam masyarakat. Sudah

seharusnya perdebatan mengenai kesetaraan jender disudahi karena kesetaraan merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia terlepas dari jendernya.

Ms. Pikulkeaw Krairiksh, Anggota Parlemen Thailand menyampaikan mengenai langkah-langkah Pemerintah Thailand dalam mitigasi sosial dan ekonomi. Beberapa yang dilakukan seperti, stimulus bisnis 3 miliar Bath untuk mitigasi sosial dan bantuan masyarakat terdampak, dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mendukung likuiditas pasar surat utang negara, dukungan bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan, dan bermitra dengan *United Nations Development Programme (UNDP)* Bangkok dalam bentuk pelatihan. Ms. Krairiksh juga menekankan pentingnya kesetaraan jender terkait akses vaksin bagi anak dan perempuan.

Agenda 3. Pengarus-utamaan Jender dalam program-program *the Fifth World Conference of Speakers of Parliament*

Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, menyatakan harapannya agar parlemen seluruh dunia dapat bersinergi dalam mewujudkan kesetaraan jender. Terkait dengan usulan untuk membuat panel tentang *gender equality* pada *5th World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP)*, mendukung adanya panel baru pada 5WCSP tersebut. Namun perlu dipastikan bahwa pembahasan panel diskusi pada 5WCSP tidak tumpang tindih dengan pembahasan panel diskusi pada 13SWSP.

Pembahasan isu *gender equality* pada 5WCSP, sebaiknya ditujukan untuk:

- Membangun komitmen seluruh Speakers Parlemen untuk memajukan *gender equality* pada masa paska pandemi.
- Membangun strategi dan sinergi antara berbagai Parlemen di dunia untuk memajukan *gender equality*.

Mengenai tema yang diusulkan, yaitu "*Towards a new Social Compact for Gender Equality*", Ketua DPR RI berpandangan bahwa tema sebaiknya lebih luas dan tidak

hanya menyangkut *social compact*, mengusulkan diubah menjadi: “*Towards a new Global Compact for Gender Equality.*”



Dr. (H,C.) Puan Maharani memberikan intervensi

Dengan perubahan tema ini, maka dapat mencakup tujuan panel diskusi (dalam laporan Sekretariat IPU) untuk membahas 1) *legal equality*, 2) *economic equality*, dan 3) *power equality*.

Selain tujuan 3 *equality* tersebut, perlu pula ditambahkan tujuan lain terkait *social equality*, yang dapat menjawab pertanyaan:

- Hambatan sosial apa yang menghalangi kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan?
- Bagaimana pergeseran nilai sosial dapat berperan memajukan pemberdayaan perempuan?

Mengenai cara terbaik mengintegrasikan isu *gender equality* dalam *Outcomes 5WCSP*, hal ini dapat dilakukan dengan membuat 1 sub-tema tersendiri tentang

gender equality pada Deklarasi 5WCSP. Hasil (*outcome*) pertemuan 13SWSP yang berupa *Chair's Summary* dapat diintegrasikan pada Deklarasi 5WCSP.

Ms. Stephanie D'Hose, Presiden Senat Belgia menyatakan sepakat untuk melibatkan para Anggota Parlemen pria dalam pembahasan kesetaraan jender sangatlah penting, karena diharapkan dapat mendorong *transformative action*. Lebih lanjut Ms. D'Hose mendorong agar pertemuan tersebut dapat menghasilkan *Chair Summary* dan *Outcome Document* yang merangkum seluruh pembahasan maupun pandangan Ketua Parlemen yang hadir.

Ms. Claudia Roth, Deputy Ketua Parlemen Jerman menanggapi pernyataan Ketua DPR RI, setuju bahwa pembahasan harus lebih luas. Ms. Roth juga mengusulkan bahwa tidak hanya mengangkat isu mengenai *Sustainable Development Goals (SDGs)* tapi juga *Paris Agreement*, khususnya terkait masalah krisis iklim yang membutuhkan peran perempuan, utamanya di negara berkembang. Lebih lanjut dia mengajukan definisi "*feminist foreign policy*" dapat untuk digaungkan sebagaimana disampaikan oleh perwakilan dari negara-negara Skandinavia dalam forum PBB.

Ms. Beatriz Argimón, Presiden Parlemen Uruguay mengusulkan agar pembahasan bukan hanya spesifik mengenai isu perempuan, tapi lebih dalam dari itu, yaitu masalah sosial (*patriarchy*) yang menjadi masalah mendasar bagi pencapaian kesetaraan jender. Saat ini kita membutuhkan konstruksi sosial yang adil di masyarakat dan menyadari pentingnya *framing* mengenai masalah ini dalam forum. Para anggota parlemen perlu mempertimbangkan mengenai masalah sosial yang terjadi ini.

Mr. Martin Chungong, Sekretaris Jenderal IPU berharap agar para Ketua Parlemen perempuan dapat konsisten dan kuat dalam mendorong poin-poin mengenai perempuan ini masuk ke dalam program *Speakers Conference* yang akan diselenggarakan.

2. WORLD CONFERENCE OF SPEAKERS OF PARLIAMENTS

Agenda 1. Adopsi Agenda

Rapat dibuka oleh **Mr. Duarte Pacheco, Presiden IPU**, yang menyatakan apresiasinya atas kehadiran para anggota pada Sidang *Preparatory Committee 5th World Conference of Speakers Parliament*. Pada kesempatan ini dia menyatakan pentingnya kolaborasi dan kerja sama dari seluruh parlemen di dunia, terutama di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Pelaksanaan konferensi para Ketua Parlemen pada bulan September 2021 merupakan saat yang penting untuk mengingatkan kembali akan pentingnya peran parlemen di saat – saat seperti ini.



Para Ketua Parlemen yang hadir pada pertemuan *Preparatory Committee of the 5WCSP*

Mr. Martin Chungong, Sekretaris-Jenderal IPU menyatakan bahwa syarat kuorum sebagai syarat sahnya persidangan sudah tercapai dan menanyakan apakah forum dapat mengadopsi agenda. Seluruh peserta dapat menerima agenda.

Lebih lanjut dia menyatakan bahwa akan sulit untuk mengakomodir format *hybrid* dan menekankan pada pentingnya untuk melakukan pertemuan secara langsung.

Ms. Tone Wilhelmsen Trøen, Ketua Parlemen Norwegia sebagai pemimpin rapat *Preparatory Committee* untuk penyelenggaraan *Women Speaker Conference* menyampaikan hasil rapat yang telah diselenggarakan sebelumnya. Ms. Troen berharap sinergi di antara kedua konferensi tersebut untuk menjadikan isu pengarus-utamaan jender sebagai fokus utama yang melibatkan baik para Ketua Parlemen laki-laki maupun perempuan.

Agenda 2. Adopsi Laporan Pertemuan Kedua Komite Persiapan

Mr. Jacob Mudenda, Ketua Parlemen Zimbabwe memberikan masukan agar laporan penyelenggaraan sidang sebelumnya dapat dibuat secara lebih spesifik. Laporan terakhir yang diterima hanya membahas hasil yang telah dicapai secara umum, tetapi tidak membahas pendapat masing-masing Ketua Parlemen pada persidangan tersebut.

Lebih lanjut dia juga memberikan apresiasi atas upaya Austria untuk memastikan rapat secara tatap muka dapat dilaksanakan dan berjalan lancar. *Video message* sebaiknya dibatasi hanya bagi para Ketua Parlemen yang tidak bisa hadir. Jika mengadopsi format *Doha Debate* agar menghindari konfrontasi yang tajam dan tetap mengutamakan semangat kolejial.

Di luar hal yang telah disinggung oleh Ketua Parlemen Zimbabwe, tidak terdapat keberatan terhadap laporan tersebut dan para delegasi mengadopsi laporan rapat kedua.

Agenda 3. Proposal Penyelenggaraan Debat Umum

Mr. Andries Gryffroy, Anggota Parlemen Belgia berpendapat bahwa format *Doha Debate* lebih interaktif dan menarik. Format tersebut bertujuan agar diskusi dapat

berlangsung secara dinamis dan melibatkan seluruh anggota parlemen yang hadir untuk bertukar gagasan secara lebih mendalam dan interaktif.

Mr. Steingrímur J. Sigfússon, Ketua Parlemen Islandia mendukung penggunaan format *Doha debate* untuk digunakan pada konferensi para Ketua Parlemen, khususnya pada sesi *General Debate*. Namun, jika ada yang mengirim *National Statement* melalui *video message* juga tidak mengapa, asalkan nantinya ada diskusi lebih lanjut secara lebih spesifik

Ms. Beatriz Argimón, Ketua Parlemen Uruguay juga mendukung penggunaan format *Doha Debate*. Agar pikiran para Ketua Parlemen dapat disampaikan dan digali secara lebih baik, solusinya adalah menggunakan format ini.

Ms. Cynthia Lopez Castro, Perwakilan Youth Parliament mendukung format *Doha Debate* dan mengusulkan topik mengenai Kepemimpinan Pemuda dan mendorong agar para anggota parlemen muda untuk memberikan sudut pandang mereka, terutama pada topik mengenai demokrasi dan dampak pandemi terhadap para pemuda. Dia juga mengusulkan sesi khusus untuk para Ketua Parlemen muda, dimana tercatat ada 25 Ketua Parlemen dengan umur di bawah 45 tahun.

Mr. Reinhold Lopatka, Perwakilan Parlemen Austria menyatakan komitmen kesiapan Parlemen Austria dan telah menyiapkan persiapan terkait *social distancing*. *National Statement* penting dan jika dibutuhkan perlu diadakan sesi untuk para Ketua Parlemen menyampaikan *National Statement*-nya. Lebih lanjut dia juga menyatakan bahwa berbagai persiapan terkait tempat dan pengamanan telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan pada rapat-rapat sebelumnya.

Ms. Claudia Roth, Wakil Ketua Parlemen Jerman menyampaikan bahwa para Ketua Parlemen dapat mengirimkan *National Statement* melalui *video message*. Penggunaan format *Doha Debats* juga dapat menjadi sarana bagi seluruh pihak (tuan rumah, pengamat, dan lain-lain) untuk menggali secara lebih mendalam terkait permasalahan yang diangkat di dalam konferensi tersebut.

Walaupun menekankan bahwa format debat lebih komprehensif dan mendalam, dia tetap mendukung penyampaian intervensi melalui video, sebagai bentuk akomodasi terhadap kebiasaan dan situasi yang berbeda di antara berbagai parlemen.

Dr. Sihar Sitorus, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen, DPR RI, menyampaikan kembali pandangan Indonesia bahwa Konferensi Para Ketua Parlemen Dunia memberikan kesempatan yang baik bagi para Ketua Parlemen untuk menyampaikan sikap resminya terkait tema yang diangkat pada konferensi tersebut. Oleh karena itu, format debat umum harus memungkinkan Ketua Parlemen menyampaikan pandangan mereka tentang isu-isu penting yang dibahas dalam Konferensi.



Dr. Sihar Sitorus, Wakil Ketua BKSAP menyampaikan intervensinya

Format debat umum ini memungkinkan para Ketua Parlemen untuk memahami lebih baik posisi negara-negara terkait isu-isu tertentu. Sedangkan usulan untuk debat interaktif dapat dilakukan pada saat Diskusi Panel. Kita bisa mengikuti format Davos dari *World Economic Forum*, atau format *Doha Debate* untuk *Panel Discussion*.

Diskusi Panel ini dimaksudkan untuk memperkenalkan ide atau kebijakan baru, berbagi praktik terbaik, atau untuk menentang posisi tertentu.

Namun, harus mempertimbangkan kembali apakah perlu melakukan pemungutan suara jika mengambil format *Doha Debate*. Para delegasi sebaiknya menghindari pengambilan keputusan secara voting, dan mengakomodasi perbedaan pandangan seluas mungkin.

Karena kemungkinan untuk mengadopsi konferensi secara *hybrid*, maka sebaiknya untuk memberikan kesempatan kepada para Ketua Parlemen untuk memilih apakah ingin berpartisipasi pada debat ataukah mengirimkan *National Statement* dalam bentuk *video message*. Hal ini penting karena kondisi yang berbeda antar-satu negara dengan negara lainnya.

Agenda 4. Proposal for Panels at the 5WCSP

Mr. Reinhold Lopatka, Perwakilan Parlemen Austria mengusulkan untuk mengangkat isu Keamanan / *Security* ke dalam salah satu panel. Hal ini penting karena masih banyak permasalahan keamanan yang terjadi, terutama terorisme atas landasan ideologis, maupun hal lainnya. Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, parlemen harus mengambil peran sebagai wadah dialog yang demokratis. Parlemen dapat menjadi contoh bahwa perbedaan pendapat dapat diselesaikan bukan dengan kekerasan, seperti terorisme, tetapi melalui dialog yang inklusif dan terbuka.

Dr. Sihar Sitorus, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI menyatakan dukungan untuk mengadakan panel diskusi yang secara khusus mendiskusikan isu terkait kesetaraan gender dan memperkuat sinergi antara *Women Speaker Summit* dan *World Conference of Speakers of Parliament*.



Dr. Sihar Sitorus, Wakil Ketua BKSAP menyampaikan intervensinya

Wakil Ketua BKSAP juga mengusulkan tema terkait panel diskusi, yaitu “*the Role of Parliament during Covid-19 pandemic: How Parliament deals with the impact of pandemic, and How Parliament accelerates the recovery in the post pandemic period*”. Karena itulah beliau mengusulkan bahwa yang harus menjadi fokus saat ini adalah permasalahan produksi dan distribusi vaksin, bagaimana mencegah penyebaran virus, dan menghadapi mutasi virus. Hasil yang diharapkan dari diskusi panel ini adalah mendorong agar negara-negara produsen vaksin meningkatkan produksi mereka dan berbagi dengan negara-negara yang kesulitan memperoleh vaksin.

Mr. Chen Guomin, Perwakilan Parlemen China mendukung usulan Indonesia untuk menyatukan format *Doha Debate* dan *National Statement*. Hal ini penting agar sidang para Ketua Parlemen tersebut dapat mengakomodasi perbedaan dan kepentingan dari seluas mungkin peserta persidangan.

Mr. Martin Chungong, Sekretaris-Jenderal IPU menyatakan dukungan untuk mengarus-utamakan pendekatan yang berperspektif jender dan pemuda ke dalam seluruh diskusi panel.

Agenda 5. Outcome document

Dr. Sihar Sitorus, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen, DPR RI menyampaikan beberapa usulan terkait beberapa isu yang dapat diangkat menjadi *Outcome Document*, di antaranya:

- *Multilateralism in Times of Pandemic: Strengthening Efforts to Foster Global Collaboration, Coordination, and Solidarity.*
- *COVID-19 and Its Impact on Democracy: Ensuring Parliamentary Openness, Transparency, and Accountability*
- *The Role of Parliaments in Sustaining Peace and Security in Times of Pandemic.*
- *Strengthening Parliamentary Commitment on Post-Pandemic Green Recovery to Build Back Better*
- *The role of Parliaments in enhancing health cooperation during pandemic period, including in the area vaccine production and distribution.*
- *The role of Parliaments in optimizing the benefit of digital technology in the pandemic era.*
- *The role of Parliaments to build inclusive recovery process: how we deal with poverty, inequality, unemployment, gender equality, lack of access to health services, and education.*
- *Advancing Women's Leadership and Political Participation as a Key to Build a More Resilient and Sustainable World after COVID-19 Pandemic.*

Ms. Claudia Roth Deputi Ketua Parlemen Jerman, mengapresiasi kepedulian para anggota parlemen yang tergabung dalam *Preparatory Committee* terkait isu *Sustainable Development Goals (SDG)*. Hal ini penting, karena batas waktu target pencapaian pada tahun 2030 akan segera berakhir. Di tengah pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun, berbagai indikator pencapaian

menunjukkan kecenderungan memburuk. Oleh karena itulah keterkaitan di antara kedua isu tersebut sangat relevan untuk diangkat pada persidangan tahun ini.

Kepedulian pada isu pemuda, keamanan, dan demokrasi juga merupakan hal yang penting untuk dibahas. Beliau menyatakan bahwa ketiga isu tersebut akan saling terkait dalam beberapa waktu ke depan. Selain isu tersebut hal yang menjadi perhatian dewasa ini adalah terkait topik digitalisasi dan perlindungan data. Anggota parlemen dapat menjadi garda terdepan dalam mengangkat *awareness* terhadap isu-isu tersebut.

Mr. Duarte Pacheco, Presiden IPU mendorong agar *Outcome Document* yang dihasilkan tidak terlalu kompleks atau panjang. Dokumen tersebut haruslah mudah dipahami oleh masyarakat dan pemangku kepentingan di luar IPU. Hal ini penting agar persidangan dan keluaran yang dihasilkan relevan dengan kepentingan global.

Mr. Reinhold Lopatka, Perwakilan Parlemen Austria berharap agar *Outcome Dokument* dapat dicapai melalui konsensus. Oleh karena itu, mendorong Sekretariat untuk memformulasikan dan melibatkan seluruh anggota *Preparatory Committee* terlibat dalam proses ini.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Penyelenggaraan sidang 5WCSP akan menggabungkan format Doha Debate dan National Statement dalam bentuk video message.
2. Mengarus-utamakan isu kesetaraan jender ke dalam setiap panel diskusi pada persidangan 5WCSP.
3. Mengangkat isu terorisme, pemuda, dan perlindungan data ke dalam beberapa panel.
4. Mendorong konsensus terhadap *Outcome Document* yang dihasilkan.

IV. PENUTUP

A. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran sebagai berikut:

- *Paparan narasumber*
- *Dokumentasi*
- *Liputan media elektronik*

B. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Kegiatan dalam rangka mengikuti sidang virtual “*the Third meeting of the Preparatory Committee for the in-person segment of the Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5th WCSP) and 13th SOWS*” pada tanggal 30 April 2021 secara virtual. Dokumen mengenai sidang akan dijadikan lampiran. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 30 April 2021

a.n. Ketua Delegasi,



DR. Sihar P.H Sitorus, BSBA, MBA
A-139

LAMPIRAN



SARAN BUTIR WICARA

DR (H.C.) PUAN MAHARANI

KETUA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PADA PERTEMUAN *VIRTUAL*

**PREPARATORY COMMITTEE FOR
THE 13TH SUMMIT OF WOMEN SPEAKERS OF PARLIAMENT
(13SWSP)**

JAKARTA, 30 APRIL 2021

1. Adoption of the agenda

Pimpinan pertemuan akan sampaikan usulan untuk mengesahkan agenda pertemuan ini.

Saran posisi

Kiranya dapat disetujui agenda pertemuan ini.

2. Preparations for the in-person segment of the 13SWSP

Preparatory committee akan melanjutkan pembahasan untuk identifikasi dan menyepakati thema, program, dan pengaturan lain. Pimpinan pertemuan (Speaker Parlemen Norwegia) akan meminta masukan dari para Speakers yang hadir.

Saran Posisi

Terkait pelaksanaan 13th Summit of Women Speakers of Parliament (SWSP).

Perlu diperhatikan bahwa telah ada berbagai forum yang membahas isu *gender equality*, karenanya:

- Saya berharap SWSP agar mendorong sinergi berbagai forum internasional untuk berkolaborasi memajukan isu *gender equality*.
- Perlu adanya nilai tambah berupa peran Parlemen, yang dapat memperkuat atau memperbaiki kebijakan *gender equality*.

Untuk metode kerja Preparatory Committee ini, saya sarankan jika belum ada kesepakatan pada pertemuan malam ini, maka Ketua pertemuan dapat merangkum dahulu berbagai masukan yang ada. Selanjutnya Ketua Pertemuan dapat menyampaikan usulan baru yang merupakan middle ground persiapan 13SWSP. Masing-masing dari kita perlu ada fleksibilitas untuk take and give, kecuali kita memiliki keberatan mendasar (*strong objection*), maka sebaiknya kita dapat menerima usulan *middle ground* tersebut. Sebaiknya keputusan diambil secara konsensus, agar ada *ownership* keputusan tersebut.

Sekretariat IPU dalam papernya telah menyusun thema baru yaitu *“Women at the centre: From confronting the pandemic to furthering progress in a gender responsive recovery.”*

Saya usulkan sedikit merubah untuk menunjukkan peran kepemimpinan Parlemen perempuan dan bersifat *forward looking*, seperti halnya pada thema SWSP 2020:

“Women’s Parliamentary Leadership: From confronting the pandemic to advancing progress in a gender responsive recovery.”

Terkait agenda 13 SWSP, saya setuju akan usulan sekretariat IPU akan ada *opening session* dan 2 panel diskusi.

Pada opening session dapat diundang tokoh perempuan internasional yang menginspirasi kepemimpinan perempuan secara global selama pandemi, seperti Chancellor Jerman, atau Perdana Menteri Selandia Baru

- o untuk memberi pandangan tentang bagaimana perempuan dapat berperan mengatasi dan mengakselerasi pemulihan paska pandemi.

Terkait topik panel diskusi, saya setuju akan perlunya 2 (dua) panel diskusi (yang diusulkan sekretariat IPU). Topik sebaiknya juga bersifat forward looking, dan tidak saja mengidentifikasi capaian dan masalah selama ini. Untuk topiknya, saya usulkan:

1. Panel pertama terkait topik demokrasi dan partisipasi politik perempuan, terkait upaya peningkatan representasi perempuan pada pengambilan keputusan di masa paska pandemi, dan
2. Panel kedua terkait topik ekonomi dan sosial, terkait peran perempuan untuk percepat pemulihan krisis ekonomi paska pandemi. Selain itu dapat dibahas isu sosial seperti upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan selama pandemi.

Terkait metode panel diskusi, saya berpandangan panel diskusi yang dilakukan secara reguler sudah cukup efektif dan interkatif untuk memunculkan gagasan baru, ataupun untuk *sharing best practices*. Panel diskusi ini dapat dipandu moderator profesional, dan para Speakers perempuan dapat menjadi panelis, serta dilanjutkan diskusi dengan peserta lainnya.

Namun jika panel diskusi tetap akan dilakukan dengan metode Doha Debate, perlu dipertimbangkan agar tidak dilakukan voting diproses akhirnya. Karena sebetulnya kita tidak mencari posisi mana yang lebih unggul atau pandangan siapa yang kalah atau menang. Sebetulnya maksud panel diskusi ini adalah mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

3. Gender mainstreaming in the programme of the Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP)

Preparatory Committee akan membahas thema untuk panel gender equality dan mendiskusikan cara untuk meningkatkan integrasi ke dalam Panel pada 5WCSP

Saran posisi

Terkait dengan usulan untuk membuat panel tentang *gender equality* pada 5th World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP), saya dapat mendukung adanya panel baru pada 5WCSP tersebut. Namun perlu dipastikan pembahasan panel diskusi pada 5WCSP tidak tumpang tindih dengan pembahasan dengan panel diskusi pada 13SWSP.

Pembahasan isu *gender equality* pada 5WCSP, kiranya dapat dimaksudkan untuk:

- Membangun komitmen seluruh Speakers Parlemen untuk memajukan *gender equality* pada masa paska pandemi.
- Membangun strategi dan sinergi antara berbagai Parlemen di dunia untuk memajukan *gender equality*.

Mengenai thema yang diusulkan yaitu “*Towards a new Social Compact for Gender Equality*”, saya berpandangan bahwa thema sebaiknya lebih luas dan tidak hanya menyangkut *social compact*. Maka saya usulkan sedikit diubah: “*Towards a new Global Compact for Gender Equality*.”

Dengan perubahan thema ini maka akan dapat mencakup tujuan panel diskusi (dalam paper sekretariat IPU) untuk membahas 1) *legal equality*, 2) *economic equality*, dan 3) *power equality*.

Selain tujuan 3 *equality* tersebut, perlu pula ditambahkan tujuan lain terkait *social equality*, yang dapat menjawab pertanyaan:

- Hambatan sosial apa yang menghalangi kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan.
- Bagaimana pergeseran nilai sosial dapat berperan memajukan pemberdayaan perempuan.

Mengenai cara terbaik mengintegrasikan isu *gender equality* dalam *outcomes* 5WCSP, hal ini dapat dilakukan dengan membuat 1 sub-thema tersendiri tentang *gender equality* pada Deklarasi 5WCSP.

Hasil (*outcome*) pertemuan 13SWSP yang berupa Chair's summary dapat diintegrasikan pada Deklarasi 5WCSP.

4. Any other business

Jika ada hal-hal lain yang tidak tercakup sebelumnya, maka dapat disampaikan pada agenda ini.

---o0o---



Third Meeting of The Preparatory Committee for the In-Person Segment of The Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP)

Virtual Meeting, 30 April 2021

Saran Butir Wicara

- **Adoption of the agenda**
- **Adoption of the report of the second meeting of the Committee**

The Preparatory Committee will be invited to approve the report of the meeting that was held on 12 April 2021.

Saran butir wicara:

Indonesian Parliament has no objection.

- **Proposal for the organization of the General Debate**

At its previous meeting, the Preparatory Committee underscored the need to ensure a high level of interaction among the parliamentary leaders, including in terms of the format of sessions. The Preparatory Committee will be invited to consider an alternative format for the traditional General Debate, as well as a list of possible themes for the motions of the Doha style debates

Saran butir wicara:

- ✓ I would like to reconvey Indonesia's position that World Speakers Conference presents a good opportunity for all Speakers of Parliaments to convey their official position on the theme of the conference. Therefore, the format of general debate should allow Speakers of Parliaments to deliver their views on the important issues being discussed in the Conference. We also still need to follow the format in any other UN forum that convenes general debate as a forum for each delegation to deliver its official statement.

- ✓ This traditional format of general debate will allow us to follow closely and understand better the position of certain countries. We may not be able to follow all countries' position, but we are usually interested in position of certain countries that are important to us such as our neighboring countries.
- ✓ While on the suggestion to have interactive debate, it can be hold during the Panel Discussion. We can follow Davos format of the World Economic Forum, or Doha Debate format for Panel Discussion. This Panel discussion is intended to introduce new idea or policy, share best practices, or to argue against certain position.
- ✓ However, we should reconsider whether we need to have the voting at the end of Doha debate. If we argue about one policy on certain issues, it should not be judged by voting, as it is not about whose idea or policy prevails. One policy will serve its purpose only under certain circumstances, and therefore it is not appropriate to judge policy option by performing voting at the end of the Doha debate.
- ✓ Due to the possibility of holding hybrid meeting which may limit our face-to-face interactions to perform the Doha styles debates (as proposed by some Speakers at the previous meetings) in the whole General Debate sessions, I believe that it would be quite problematic to oblige every Speaker to stand in favor or against the agreed motions and deliver their views on this regard. In other words, it would be better if we let the Speaker decide whether he/she wanted to participate in the Doha style debates or deliver their national statements, as we usually do in the parliamentary summit session, on the agreed motions with the time limitation (for example: 3-4 minutes for each Speaker). Thus, either way could still ensure the efficacy of General Debate as an opportunity for Speakers to deliver their national views regarding such issues.

- **Proposal for panels at the 5WCSP**

Further to the recommendations formulated by the Preparatory Committee at its previous meeting on 22 February and 12 April, the Secretariat has prepared a revised general overview of the panels that will be held during the 5WCSP. This includes a fifth panel that will focus on gender equality.

Saran butir wicara:

Indonesian Parliament supports the adoption of the revised version of the panels which include the discussion on gender equality to bolster the synergy between Women Speakers Summit and World Conference of Speakers of Parliaments.

On the theme of the Panel discussion, I think there it is still missing one big issue: The role of Parliament during COVID-19 pandemic: How Parliament deals with the impact of pandemic, and How Parliament accelerates the recovery in the post pandemic period.

Therefore, we propose that one of the Panels needs to discuss the theme on the role of Parliaments in handling COVID-19 pandemic, among others the issue of ramping up production and distribution of vaccine, how to prevent the spread of the virus, and deal with mutation of virus. The result of this panel is, among others, to have a strong statement to urge vaccine producing countries to boost their vaccine production and vaccines surplus countries to share their vaccine stock to those countries in need.

- **Outcome document**

The members of the Preparatory Committee have been invited to submit their proposals of key elements that they would like to see reflected in the outcome document of the 5WCSP. A compilation of the proposals received by Friday, 23 April is enclosed. Further contributions will be circulated separately as and when these are received. The Preparatory Committee is invited to consider these proposals, after which the Secretariat will prepare a preliminary draft for consultations with the wider membership as decided by the Preparatory Committee.

Saran butir wicara:

Outcome document should contain identification of the challenges that are confronted by Parliaments and possible solution and policies options that can be taken in the future.

With regard to the key elements reflected at the outcome document, I would like to propose the following issues:

1. Multilateralism in Times of Pandemic: Strengthening Efforts to Foster Global Collaboration, Coordination, and Solidarity.
2. COVID-19 and Its Impact on Democracy: Ensuring Parliamentary Openness, Transparency, and Accountability
3. The Role of Parliaments in Sustaining Peace and Security in Times of Pandemic.
4. Strengthening Parliamentary Commitment on Post-Pandemic Green Recovery to Build Back Better
5. The role of Parliaments in enhancing health cooperation during pandemic period, including in the area vaccine production and distribution.
6. The role of Parliaments in optimizing the benefit of digital technology in the pandemic era.
7. The role of Parliaments to build inclusive recovery process: how we deal with poverty, inequality, unemployment, gender equality, lack of access to health services, and education.
8. Advancing Women's Leadership and Political Participation as a Key to Build a More Resilient and Sustainable World after COVID-19 Pandemic.

▪ Any other business



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

PrepCom 3

CONF-2021/PrepCom3/5-P.1-rev
28 April 2021

Input from PrepCom members on elements to be included in 5WCSP outcome document

Contributions from Austria

Basically, it should be borne in mind that the 5WCSP is the second part of a conference that has already adopted a detailed declaration in 2020. This declaration should not be duplicated, but rather include a review of the pandemic year that lies behind us and offer an action-oriented outlook.

From the Austrian perspective and on the basis of the third panel **the security of parliaments and parliamentarians** as well as the **security of democratic systems and values** should be reflected in the action-based outcome document. In this context, related aspects to the COVID-19 pandemic, like the vulnerability of democracies and the loss of confidence in authorities, but also other security issues, like hybrid threats, cybercrime, hate speech and the threat of extremism and terrorism, should be considered.

Throughout the outcome document, **gender and youth perspectives and participation** should be considered as well.

For Austria it is crucial that the outcome document can be adopted by consensus. Therefore, it is important to involve all members regarding the content and wording of the document at an early stage.

* * * *

Contributions from Belgium

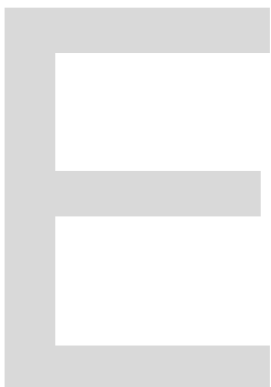
- Impact of the pandemic on parliamentary democracy: debate and exchange of best practices
- Impact of the pandemic on women

* * * *

Contributions from China

1. Maintaining multilateralism in response to global challenges

The IPU is an important outcome and beneficiary of multilateralism. History and reality have proven to us once and again that humanity has become a community with a shared future in which everyone is bound together and mutual interests are highly interwoven. Global challenges can only be overcome by global actions, global responses and global cooperation. The key to firmly uphold multilateralism is to practice multilateralism in international affairs, to steadfastly uphold the international system with the UN as its core, to resolutely safeguard the international order underpinned by international law, and to unswervingly support the UN to play its core role in international affairs. International affairs ought to be addressed through consultation among all, rather than by a small group of countries, even less by seeking “new Cold War”. It is our hope that the Speakers’ Conference will focus on its theme and serve as a platform for equal dialogues and in-depth communication, so that we can strengthen multilateralism, step up cooperation in response to global challenges and build a community with a shared future for mankind.



2. Actively responding to COVID-19 and promoting international cooperation on public health

COVID-19 is a common enemy of humanity. A final victory can only be declared when all countries have defeated the virus. We should uphold unity and solidarity as partners and boost international cooperation against COVID-19. We should keep supporting the WHO in playing its crucial leadership role, especially in the research, development and distribution of vaccines. In so doing, we can work together to ensure vaccines to be a global public good for health, with special attention paid to the accessibility and affordability of vaccines in developing countries, and to build a community of health for all.

3 Promoting economic growth and enabling global economic and social recovery after COVID-19

Hit by COVID-19, global industrial and supply chains are interrupted. Trade and investment activities are subdued. Global economic recovery is imbued with uncertainties. We should jointly maintain the rules-based multilateral trading system with the WTO as its core. We should step up macro-economic policy coordination, advance investment and trade liberalization and facilitation, and actively engage in international cooperation on poverty reduction, agriculture and education. We call for developed countries to support developing countries in infrastructure construction, in a bid to step up the implementation of the Agenda 2030 for Sustainable Development. New impetus should be injected into the post-COVID 19 capital, personnel and technology flow, to create an enabling environment for global economic recovery.

4 Advancing digital economy and safeguarding digital security

As information and technological revolutions make progress with each passing day, the rapid development of digital economy bears on our economic and social development and people's wellbeing. In the meantime, the risks and challenges concerning digital security has become more acute, awaiting an urgent global solution. China has put forth a Digital Security Initiative, aiming at maintaining the security of global data and supply chains and furthering the development of digital economy, so as to provide a blueprint for formulating global rules in this area. On solving the real problems concerning data security, we hope that parliaments will uphold multilateralism and jointly contribute to the formulation of just and reasonable global rules on data security on the basis of impartiality and reason.

* * * *

Contributions from Germany

Germany supports the proposals from Norway (see below). In addition:

- Covid-19 is confronting the world not just with a single pandemic, but with several concurrent pandemics. The coronavirus has triggered a poly pandemic, undermining progress in development, heightening state fragility and further eroding international cooperation. If we fail to contain Covid-19 and the numerous other knock-on pandemics it is creating – including the pandemics of hunger, poverty, inequality, education, violence and authoritarianism – then the suffering of already vulnerable countries and populations is likely to be massively exacerbated.
- We must work harder to implement the SDG's and the Paris agreement – not much time left!
- Strengthening the role of parliaments with more transparency in legislation
- Creating awareness that we are dealing with a poly-pandemic: hunger, poverty, inequality, violence, education and authoritarianism.

* * * *

Contributions from Indonesia

1. Multilateralism in Times of Pandemic: Strengthening Efforts to Foster Global Collaboration, Coordination, and Solidarity.
2. COVID-19 and Its Impact on Democracy: Ensuring Parliamentary Openness, Transparency, and Accountability
3. The Role of Parliaments in Sustaining Peace and Security in Times of Pandemic.

4. Strengthening Parliamentary Commitment on Post-Pandemic Green Recovery to Build Back Better
5. The role of Parliaments in enhancing health cooperation during pandemic period, including in the area vaccine production and distribution.
6. The role of Parliaments in optimizing the benefit of digital technology in the pandemic era.
7. The role of Parliaments to build inclusive recovery process: how we deal with poverty, inequality, unemployment, gender equality, lack of access to health services, and education.
8. Advancing Women's Leadership and Political Participation as a Key to Build a More Resilient and Sustainable World after COVID-19 Pandemic

* * * *

Contributions from Norway

- A green recovery from the pandemic
- Welcome the US to the Paris agreement, expectations for the COP in Glasgow
- We must work harder to implement the SDG's – not much time left!
- Women have done their part during the pandemic, now they must be a part of the recovery by being represented with parity in decision-making bodies such as parliaments and government, but also in private companies
- Vaccines for everyone, no one is safe until everyone is safe
- Human rights must be respected, also in a pandemic: freedom of speech, free press, rule of law, no arbitrary detention
- youth perspectives

* * * *

Contributions from Thailand

1. The outcome document should emphasize the role of parliaments in addressing COVID-19 pandemic, as well as the need for cooperation among international organizations, whose authority and credibility has been built over decades, and put more faith in multilateralism to work together amidst the coronavirus emergency. It is important to stress a critical role of the international institutions to, globally and regionally, support the efforts of the United Nations and the WTO in the face of COVID-19 global health crisis. All parliamentarians must take concrete actions, through their mandates, both at domestic and international levels, to address adverse impacts on global economic growth and social consequences caused by COVID-19.
2. The outcome document should clearly reflect the parliamentary leadership for more effective multilateralism amidst the pandemic of COVID-19 that requires stronger partnership among multi-stakeholders. Parliamentarians should play a key role in promoting investment in vaccine research and development, as well as encouraging information and knowledge transfers from developed to developing countries. Also, parliamentarians need to ensure a fair and equitable distribution and access to medical resources, treatments and vaccination for vulnerable populations.

* * * *

Contributions from Zimbabwe

1. Recent global events have brought to the fore the glaring need for Parliaments to take their place on the global stage through parliamentary diplomacy in pursuit peace, democracy and sustainable development around the world. Now, more than ever, the need for the voice of Parliaments as representatives of the people is an imperative. Global challenges can only be resolved through collective active action. Accordingly, the declaration should emphasise the commitment of Speakers of Parliament to multilateralism and enhancing existing relations between the IPU and the International Community. In applauding such cooperation, giving examples such as the IPU's contribution to the 75th Anniversary of the United Nations, the Declaration should further express the Speakers' ardent desire to contribute towards the resolution of conflicts across the globe through Parliamentary diplomacy.

2. The Post-Pandemic recovery-transforming the economy for sustainable development
- With regards to the COVID Pandemic, the declaration should call for equitable distribution of COVID – 19 vaccines to all who need them globally in order to avoid vaccine nationalism.
 - Covid – 19 pandemic has had a negative impact on the socio-economic, cultural and political wellbeing of our communities and in particular vulnerable groups, including refugees, women and children. Containment of the pandemic calls for an all-inclusive approach with Parliaments facilitating domestication of emergency responses and recovery in collaboration with such Institutions as the World Health Organization and the World Trade Organisation. Such level of facilitation entails that Parliaments remain functional in such difficult times in our history. Some Parliaments have amended their laws to enable them to work remotely using Information Communication Technology whilst many have reduced the numbers of Members to enable social distancing practice to be effective. This hybrid approach to the sitting of Parliaments should continue so that Parliaments can fulfill their constitutional mandates of legislation, representation and oversight as the *sine qua non* of Parliamentarism.
 - The outcome Document should also focus on how the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction can be strengthened during this Covid 19 pandemic.
 - Another angle of the outcome should affirm the need for integrated scientific research on how the Covid – 19 should be eliminated globally as was the case with the 1918 influenza.
 - Covid – 19 has taught us the critical importance of ICT in e-governance. In that regard, the outcome document should address the ways of how Parliaments should come up with budgets and legislation so that the Fourth Industrial Revolution reaches out to the hinterland in order to ensure access to ICT facilities to the generality of our populace, especially in the education sector.
 - The outcome should also focus on the need for Parliamentary Leadership through the esteemed Speakers' Offices so that the decade of SDGs: 2020 to 2030 which has a demanding timeline in so far as meeting the implementation of the SDGs successfully, the SDGs being the anchor for sustainable development.
 - The outcome document should also address the principle of inclusivity of the youth and women in the socio-economic development of our respective countries, particularly as Parliaments assess the impact of the pandemic and the post economic recovery.

